



WATU PINAWETENGAN SEBAGAI PLACE-LORE DAN SIMBOL CIVIL SPHERE DI MINAHASA

Really Pelita Tumengkol^{1}, Djoys A. Rantung¹, Lamhot Naibaho¹, Thiosani Kaat¹,
Valentino R. Moku¹*

¹ Universitas Kristen Indonesia, Jl, Mayor Jendral Sutoyo No.2, Cawang, Kec. Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13630

*Corresponding author: billybarsel@gmail.com

Abstract Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Watu Pinawetengan sebagai tempat sakral atau Place-Lore (ruang pengetahuan) dalam keterkaitannya dengan pengetahuan serta spiritual masyarakat Minahasa. Masa kolonialisme sampai pascakolonialisme mentransformasi setiap aspek kebudayaan termasuk pola pikir masyarakat mengenai Watu Pinawetengan. Sebelumnya Watu Pinawetengan dimaknai sebagai ruang sakral dan Place-Lore, kini masyarakat melihat sebagai tempat penyembahan berhala. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan etnografi kemudian deskripsi-analitis mengenai ruang kearifan lokal masyarakat Minahasa dalam keterkaitannya dengan Civil Sphere (ruang masyarakat) pembentuk demokrasi purba Minahasa. Watu Pinawetengan menjadi Place-Lore dan simbol demokrasi purba bagi masyarakat Minahasa karena pernah terjadi musyawarah negeri untuk menyelesaikan konflik antar suku. Musyawarah bukan hanya terfokus pada permasalahan politis melainkan konflik antar kepercayaan dalam konteks Minahasa. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan Watu Pinawetengan sebagai Place-Lore menjadi tempat sakral bagi masyarakat Minahasa lintas generasi dan merupakan ruang bagi masyarakat melakukan selebrasi budaya.

Keyword:

*Watu Pinawetengan,
place-lore, civil sphere,
Minahasa*

Article Info

Received : 30 Okt 2023

Accepted : 13 Nov 2023

Published : 20 Nov 2023

1. Pendahuluan

Tujuan dari penelitian ini menganalisis konsep Watu Pinawetengan (batu tempat pembagian) yang dimaknai oleh masyarakat Minahasa sebagai tempat sakral. *Watu Pinawetengan* bagi masyarakat Minahasa merupakan tempat sakral atau *sacred space* dan simbol terbentuknya *civil sphere* (ruang masyarakat). Sebagai simbol *civil sphere* situs *Watu Pinawetengan* sarat akan dimensi folklore (pengetahuan masyarakat) dalam keterkaitannya dengan *place-lore* (ruang pengetahuan) yang memiliki relasi dengan emosional individual serta komunal

masyarakat Minahasa. Namun, modernisasi serta intensitas kekristenan yang berkembang pesat di Minahasa mempengaruhi dan mentransformasi pola pikir masyarakat dalam memandang *Watu Pinawetengan*. Sebelum kolonialisme dan kekristenan masuk, masyarakat melihat *Watu Pinawetengan* sebagai tempat sakral, kini dimaknai menjadi tempat penyembahan berhala. Walaupun konstruksi kekristenan dan kolonialisme berhasil menormalisasikan paradigma masyarakat mengenai kearifan lokal, *Watu Pinawetengan* masih menjadi tempat sakral bagi indigenous people (masyarakat adat).

Secara etimologi, *Watu Pinawetengan* diambil dari kata *Watu* (batu) dan *Weteng* (marah) artinya pada tempat tersebut pernah terjadi pertikaian prinsip untuk menyatukan perbedaan pendapat dari para sub-etnik yang sering bertikai (Mamengko, 2002). Namun, *Watu Pinawetengan* bagi masyarakat Minahasa menjadi simbol resistensi identitas di tengah gempuran modernisasi dan akulturasi pasca-kolonial. Hun Johanis A. Pinatik dalam perubahan agama Minahasa melihat hibriditas kebudayaan antara kekristenan dan Minahasa pada ritual *Watu Pinawetengan* terjadi kawin silang kebudayaan (Pinatik, 2021:339). Senada dengan Bertha Pantow melalui studi disertasinya mengemukakan pendapat mengenai perubahan sosial termasuk kepercayaan di Minahasa mulai pada tahun 1829 sampai sekarang (Pantow, 1994:39-40). Berdasarkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Minahasa maka dapat dikatakan *Watu Pinawetengan* mengalami degradasi makna dan menjadi tempat yang distigmatisasi sesat oleh masyarakat pada umumnya sebab dianggap masih mempercayai mitos-mitos kuno.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sebagian masyarakat melihat *Watu Pinawetengan* sebagai tempat praktik penyembahan berhala. Walaupun banyak penelitian telah menemukan hibriditas penggunaan simbol sakral di *Watu Pinawetengan* diantaranya kitab suci (Alkitab) dan simbol-simbol seperti dupa dan patung Dewi Kwan Im (Pinatik, 2021). Askelerasi perubahan sosial yang terjadi di Minahasa menjadikan *Watu Pinawetengan* sebagai ruang tengah perjumpaan Indigenous People dan Civil Society (masyarakat madani). Perjumpaan tersebut, menciptakan konsep *place-lore* sekaligus simbol *civil sphere* dan selebrasi budaya sebagai upaya *indigenous people* mempertahankan eksistensi kebudayaan Minahasa. Menurut Jeffrey Alexander Civil Sphere menaruh perhatian pada konsep ruang masyarakat tanpa intimidasi kekuasaan dan menjadi praktik keseharian sekaligus tampilan publik yang menyatukan (Alexander, 2006). Karena itu, *Watu Pinawetengan* menjadi tempat kredibilitas identitas akulturasi Keminahasa yang menyatu membentuk Folklore dan sakralitas *place-lore* sekaligus dasar strukturasi demokrasi purba masyarakat Minahasa.

Melalui konsep teoritis dari Alan Dundes penelitian ini akan menganalisis fungsi *Watu Pinawetengan* bagi masyarakat Minahasa. Bagi Dundes Folklore merupakan pengetahuan masyarakat yang menyatukan berbagai elemen

masyarakat berdasarkan fungsi sehingga menjadi narasi yang mempererat relasi komunal (Browne and Dundes, 1967:1). Kemudian konsep dari Jeffrey Alexander untuk mengeksplorasi Indigenous People mempertahankan eksistensi ruang kebebasan berekspresi berbasis lokal. Menurut Jeffrey melalui konsep *civil sphere*, menjadikan masyarakat bebas berkehendak serta tidak diatur kekuasaan dalam melakukan selebrasi budaya untuk menjaga eksistensi kebudayaan sehingga menciptakan ruang masyarakat (Alexander, 2006). Maka, dapat dikatakan *Watu Pinawetengan* menjadi ruang sakral tempat Indigenous People melakukan selebrasi budaya dan kehendak untuk menjaga *civil sphere* dalam keterkaitannya dengan solidaritas kolektif. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan penelitian, pertama, mengapa *Watu Pinawetengan* menjadi tempat sakral bagi masyarakat Minahasa? Kedua, apakah *Watu Pinawetengan* menjadi simbol identitas *indigenous people*? Ketiga, bagaimana *Watu Pinawetengan* menjadi simbol *civil sphere* di Minahasa?

2. Metode

Tulisan ini memakai metode penelitian kualitatif dalam jenis penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif menekankan sifat relitas yang terjadi pada situasi problematik untuk menemukan makna sedangkan pendekatan etnografi dipakai sebagai pisau analisis untuk mengeksplorasi nilai-nilai kultural di Minahasa. Metode kualitatif merupakan studi interpretasi (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif memiliki tahapan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi. Pendekatan etnografi merupakan teknik analisis kultural yang bertujuan untuk menarasikan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam satu komunitas tertentu (Creswell, 2009). Lebih lanjut, etnografi merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang membahas dan menganalisis nilai-nilai kultural dalam fenomena sosial. Karena itu, teknik pengumpulan data dari penelitian ini melalui observasi langsung pada situs *Watu Pinawetengan* kemudian wawancara kepada aktor sosial yang konsen memperjuangkan cerita rakyat dan nilai-nilai kearifan lokal di Minahasa. Tahap selanjutnya menggunakan studi literatur dan dokumenter untuk mencari teori dan foto serta video terkait dengan *Watu Pinawetengan*. Pada tahap selanjutnya penelitian ini akan melakukan reduksi lalu verifikasi data dan kesimpulan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Versi nama lama dari *Watu Pinawetengan* adalah *Pahwetengan in Nuwu'* (pembagian pesan orang tua). *Pahwetengan in Nuwu'* sebutan tua pada peristiwa *pinabetengan* (pembagian) yang diselenggarakan oleh para pakasa'an (Supit 1986:20-25) yang telah mengalami kesadaran akan kesenjangan sosial. Pengertian yang berkembang di kehidupan masyarakat Minahasa mengenai *Pahwetengan in*

Nuwu' adalah 'pembagian bahasa', melalui tulisan J.G.F. Riedel mengenai analisisnya tentang kehidupan orang Minahasa di masa lampau (Riedel, 1872:400-500). Tulisan-tulisan dari Riedel kemudian diserap oleh masyarakat Minahasa dengan terjemahan 'pembagian bahasa'. Hal tersebut, sangat mempengaruhi kehidupan sosio-kultural orang Minahasa sehingga terjadi degradasi dari makna. Misionaris Riedel bersama rekan-rekannya, yang berlatar belakang ideologi barat serta membawa kebudayaan Barat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Minahasa termasuk kepercayaan. Misi dan tugas dari para bangsa kolonial ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan sebuah pemahaman baru atas sistem monarki yang ada di bangsa barat khususnya Belanda pada waktu itu yang memiliki sistem kerajaan (imperialis).

Berbicara mengenai *Watu Pinawetengan* memiliki korelasi dengan asal muasal kata Minahasa. Secara etimologi, Minahasa berasal dari kata *Maesa* (bersatu) atau *Asa* (satu) bisa juga *Mahesa* (disatukan/menyatukan) kemudian mengalami konstruksi pelafalan, jika disatukan *Mina-esa* artinya yang bersatu/menyatukan (Graafland, 1991:9-10). Pada mulanya kata 'Minahasa' bukan untuk menyebutkan suatu wilayah tetapi dipakai untuk menyebut rapat negeri, laporan mengenai pelafalan Minahasa pertama kali ditemukan dalam surat yang ditulis oleh J. D. Schiersten kepada gubernur Maluku 8 Oktober 1789 (Mobergen, 1928:137). Surat tersebut, berbicara tentang perdamaian yang dilakukan oleh Bantik dan Tateli melalui musyawarah adat di *Watu Pinawetengan*. Berdasarkan fungsi, *Watu Pinawetengan* menjadi situs sekaligus saksi simbolis musyawarah-musyawarah penting bagi kehidupan sosio-kultural masyarakat Minahasa.

Sebutan mengenai Minahasa telah mengalami perubahan, sebelumnya keturunan Toar – Lumimu'ut (leluhur pertama orang Minahasa) (Schwarz, 1907) disebut sebagai Tou Malesung (manusia yang tinggal di wilayah pegunungan). Akar kata dari *Malesung* adalah *Lesung* (lumpang untuk menumbuk padi), berdasarkan letak geografis keturunan Toar – Lumimu'ut yang tinggal dilereng-lereng gunung karena itu bangsa Barat memberikan sebutan Tou Malesung. Senada dengan John F. Malonda yang mengatakan Malesung adalah Minahasa hingga kedatangan VOC (Malonda, 1952:16). Mengapa perlu membicarakan asal-usul kata Minahasa, sebab Minahasa memiliki relasi dengan *Watu Pinawetengan* berdasarkan musyawarah-musyawarah adat. Karena itu, mengulas secara historis *Watu Pinawetengan* akan berkorelasi dengan *Se Tou Mahasa* (orang yang bersatu) untuk mencapai tujuan bersama.

Watu Pinawetengan dahulu sampai sekarang memiliki fungsi untuk menentukan kebijakan bersama demi kepentingan bersama. Semenjak peristiwa *Ampuhan* (banjir bandang) selesai, leluhur Minahasa kesulitan mencari lahan subur sebab lembah pertama *Wulur Mahatus* (ribuan gunung menjulang) mengalami kelembapan sehingga tidak bisa untuk bercocok tanam. Tanah yang lembap mengharuskan leluhur Minahasa mencari tempat yang cocok untuk

bertanam dan berburu sehingga tidak mengalami kepunahan biologis. Ketika para leluhur Minahasa tiba di bukit Tonderukan (salah satu pegunungan di Minahasa) para *Walian* (pemimpin keagamaan) menemukan batu besar kemudian dijadikan *Tumotowa* (tempat persembahan kepada Empung 'adi-supra'). Musyawarah pertama diadakan di sekitar Watu Pinawetengan yang dihadiri seluruh pemimpin adat seperti, *Tona'as* (manusia bijaksana), *Walian* (pemimpin adat), *Pa'matuan* (tetua negeri) dan para *Pa'tuasan* (pemuka masyarakat) masing-masing tokoh tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mengatur masyarakat (Supit, 1986). Hasil dari musyawarah beriringan dengan sumpah dari pemimpin rapat tokoh *Tona'as Wangko* (pemimpin besar).

Sumpah dari *Tona'as Wangko* merupakan pengikat hasil kebijakan bersama sehingga masyarakat tidak mengingkari sumpah adat. Amanat atau sumpah dari *Tona'as Wangko* berbunyi berikut:

Sapakem si kayoba'an anio tana' ta im baya. Asyi endo makasa, sa me'em si ma'api, wetengan e pa'tuusa, wetengan eng kayo'ba'an. Tumani e kumeter, mapar e waraney, akad se tu'us, tumou on tumou tou (Supit, 1986:29).

Dengan ini kami menaytakan, dunia ini adalah tanah air kita semua. Bila pada suatu saat, Burung Manguni telah memberi tanda kepastian, bagilah dunia ini wahai kamu pemuka masyarakat dan pemberi contoh. Bukalah wilayah pertanian baru bagi kalian para pekerja (petani/pemburu), kuasailah wilayah, hai ksatria perkasa agar kelak keturunan kita menjadi manusia dan menghidupkan manusia lain.

Amanat ini menjadi narasi kelisanan yang ditransmisikan secara lisan kepada generasi anak cucu masyarakat Minahasa sehingga menjadi teks kebudayaan sehari-hari dalam membentuk solidaritas komunal. Jika ditinjau secara fungsional *Watu Pinawetengan* menjadi simbol pemersatu perbedaan prinsip masyarakat Minahasa dan merupakan tempat multi fungsional seperti, aturan normatif, kognitif komunal dan kebijakan untuk kesejahteraan bersama. Konsep fungsional menurut Durkheim tidak bisa dipisahkan dengan struktural. Dalam hal ini, fungsi menjabarkan secara teknis aspek-aspek kehidupan masyarakat dengan corak fungsi yang berbeda-beda (Durkheim, 2014:11-30). Artinya peran masyarakat dalam ruang lingkup sosial berada dalam skema fungsi struktur pembentuk dasar-dasar bermasyarakat.

Durkheim membatasi fungsi pada struktur masyarakat dan tidak melihat secara implisit fungsi dari simbol dalam membentuk struktur. Melalui tulisannya *The Elementary Forms of Religious Life*, (Durkheim, 2017:10) Durkheim kembali menegaskan dasar-dasar beragama akan dikatakan bermanfaat jika ada fungsinya bagi masyarakat. Durkheim kembali melihat simbol dan fungsi dari totem sebagai

pembentuk solidaritas komunal. Mendasari konsep sakral dan profan yang dikemukakan oleh Durkheim untuk melihat ruang sakral pada Watu Pinawetengan perjumpaan antara ruang profan dan sakral sama-sama bertemu pada konteks ritual yang diadakan oleh komunitas-komunitas pegiat budaya. Karena itu, Watu Pinawetengan menjadi berfungsi jika membentuk solidaritas masyarakat Minahasa sehingga membentuk folklore dan *place-lore* (tempat – pengetahuan).

Melihat Watu Pinawetengan dari perspektif fungsi memberi kontribusi holistik bagi kehidupan masyarakat. Secara fungsi, Watu Pinawetengan menjadi saksi bisu musyawarah adat perdamaian antar sub-etnik, sekaligus tempat pertemuan untuk membahas strategi perang dalam melawan kolonialisme. Peristiwa membekas pada *Watu Pinawetengan* salah satunya adalah proses konsekrasi *Tiwa* (sumpah) Toar – Lumimu'ut yang mengikat para sub-etnik utama Minahasa yaitu, Tombulu, Tontemboan, Toulour dan Tonsea. Para sub-etnik Minahasa bersepakat dan berikrar menjaga *Tiwa* dari Toar – Lumimu'ut sebagai prinsip hidup bermasyarakat dalam konteks Minahasa.

Sumpah atau *Tiwa* kembali dikumandangkan di *Watu Pinawetengan* pada peristiwa Mahwetik, masa perang saudara antara anak cucu Toar – Lumimu'ut. Peristiwa Mahwetik merupakan sejarah perang saudara pertama orang Minahasa yang menghabiskan separuh penduduknya. Masyarakat Minahasa zaman lampau memiliki pembagian stratafikasi kelompok berdasarkan fungsi. Namun, strata yang dimaksud bukan tunduk menunduk antara kelompo, penekanannya setiap kelompok memiliki ciri khas fungsi pada bidang masing-masing. Kelompok Makarua Siow (2x9) bertugas sebagai penata ritual keagamaan dengan sebutan para *Walian* (pemimpin keagamaan). Makatelu Pitu (2x7) kelompok yang bertugas mengatur sistem dan struktur dalam masyarakat, biasanya tokoh yang mengatur sistem disebut Tona'as (manusia bijaksana). Pasiowan Telu (9x7) mengurus bidang agrikultural dan perburuan.

Kisah Mahwetik ini bermula ketika para pemimpin Tona'as dan Wali'an ingin meniru sistem dan struktur wilayah sekitar Minahasa seperti, Mongondow, Ternate. Dominan wilayah sekitar Minahasa menganut sistem kerajaan sehingga hasrat untuk memimpin timbul pada kelompok Tona'as dan Wali'an untuk menguasai kelompok Pasiowan Telu (9x7). Peristiwa tersebut, memantik musyawarah di *Watu Pinawetengan* guna memperkuat kembali sumpah Toar – Lumimu'ut. Karena itu, *Watu Pinawetengan* menjadi saksi bisu terjadi musyawarah adat untuk menegaskan kembali sakralitas *Tiwa* (sumpah) dari masa Toar – Lumimu'ut sampai amanat agung dari Tona'as Wangko'. Berdasarkan fungsi secara historis, *Watu Pinawetengan* menjadi simbol identitas egaliter di tanah Minahasa secara strukturasi.

3.1. *Watu Pinawetengan* Simbol Identitas Minahasa

Seperti yang telah dinarasikan di atas *Watu Pinawetengan* berarti batu tempat

pembagian, namun sebutan lama orang Minahasa tentang *Watu Pinawetengan* adalah *Pahwetengan in Nuwu'* (tempat terjadi pembagian pesan dari para leluhur) (Wenas, 2010:25). *Pinawetengan* diambil dari kata *Weteng* atau 'marah' sebab tempat itu pernah terjadi gertakan gigi saling mengklaim kebenaran dari sub-etnik masing-masing. Jika digabungkan *Pinawetengan* artinya, 'yang telah dibagikan', pembagian tersebut adalah hasil dari kesepakatan bersama masyarakat Minahasa untuk membagikan wilayah, aturan adat, serta pesan atau *Nuwu'*. *Watu Pinawetengan* menjadi simbol perdamaian antara para sub-etnik yang sering berperang memperebutkan wilayah kekuasaan (Mamengko, 2002). Simbolisasi perdamaian di *Watu Pinawetengan* terjadi secara konstruksi regenerasi berdasarkan konteks situasi problematik, sehingga membentuk sakralitas situs dalam perspektif masyarakat.

Berdasarkan cerita masyarakat Minahasa, *Watu Pinawetengan* merupakan *Watu* penanda berdirinya kampung pasca banjir *Ampuhan*. Para komunitas atau Taranak (Mawuntu, 2017:59) melihat *Watu Pinawetengan* sebagai simbol pembebasan bencana alam sekaligus penanda kesuburan wilayah sehingga batu tersebut dijadikan mezbah persembahan kepada 'Kasuruan Wangko' (Tuhan Yang Maha Besar). Dalam hal ini, *Watu Pinawetengan* menjadi acuan historis, sosial, budaya dan prinsip yang menentukan sikap hidup masyarakat Minahasa secara turun-temurun. Secara historis, *Watu Pinawetengan* menjadi tempat musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga *Watu Pinawetengan* menjadi simbol persatuan dan persaudaraan masyarakat Minahasa. Karena itu, *Watu Pinawetengan* menjadi situs sejarah yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1947 dengan memberlakukan undang-undang UU No.11 tahun 2010 yang menetapkan *Watu Pinawetengan* sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi.

Watu Pinawetengan dianggap sebagai awal dari peradaban Minahasa di Nusantara, berdasarkan kepercayaan setempat *Watu Pinawetengan* mirip seperti manusia yang sedang menyembah kepada Tuhan, juga seperti pulau Sulawesi Utara (Sulut) (Sompe, 2021:2). Sebelumnya penemuan situs *Watu Pinawetengan* pertama kali ditemukan oleh J. A. T. Schwarz setelah sekian lama hilang dari permukaan (Schwarz, 1907). Schwarz melakukan penelitian di daerah Tonderukan bersama para hukum tua (pemimpin setempat) untuk mencari *Watu Pinawetengan*. Pencarian tersebut, meminta petunjuk kepada para leluhur dalam upacara *Mangaley* (berdoa) sehingga diizinkan oleh para leluhur untuk menggali tanah lewat bimbingan para *Tona'as*.

Era sekarang masyarakat Minahasa mengalami perubahan-perubahan sosial termasuk pengaruh modernisasi yang menjadikan generasi penerus identitas keminahasaan tidak lagi mengenal Sejarah pada peristiwa *Watu Pinawetengan* Sebelumnya negosiasi identitas telah diteliti oleh Gratciadeo Tumbelaka dengan melihat perjumpaan kekristenan dan budaya Minahasa dalam ritual Kampetan (transfigurasi) (Tumbelaka, 2020:2). Terlihat dengan jelas bahwa pre-negosiasi

dewasa ini, telah terjadi kekerasan identitas pada *indigenous people* sebagaimana pada peristiwa 1980 akhir sampai 1990 akhir terjadi pembakaran *Sompoi* (pusaka) (Malonda, 1952a). Menurut Amartya Sen kekerasan identitas terjadi ketika ada pemaksaan dan adanya kekuasaan yang memelintir identitas. Dalam hal ini Sen melihat kategorisasi yang menjadikan manusia dari sudut afiliasi tunggal yakni melalui perspektif kebenaran agama (Sen, 2007:1). Karena itu, selain menjadi simbol identitas Minahasa *Watu Pinawetengan* menjadi saksi bisu terjadinya kekerasan identitas yang dilakukan oleh kolonialisme dan dominasi kekristenan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menjadikan *Watu Pinawetengan* sebagai ruang antara penghubung masyarakat Minahasa masa lampau dan masa sekarang. Istilah ruang antara menjadi acuan sebagaimana *Watu Pinawetengan* menjadi simbol Minahasa masa lampau dan sebagai simbol akulturasi pascakolonial. Pada sisi lain, *Watu Pinawetengan* menjadi teks struktur berbasis kebudayaan yang menjelaskan terbentuknya sistem demokrasi purba dan konsep egaliter (Malonda, 1952a:20). Sebenarnya secara ontologis *Watu Pinawetengan* bukan hanya sekedar situs penanda atau simbol identitas sebab memori kolektif masyarakat Minahasa mengakar pada *Watu Pinawetengan*. Memori kolektif sangat mempengaruhi prinsip komunal, mulai dari cara membangun relasi maupun menyelesaikan konflik. Menurut Izak Y.M. Lattu dalam buku *Rethinking Interreligious Dialogue* mengatakan memori kolektif menjadi instrumen masyarakat mengenal akar identitas tradisional sehingga memungkinkan masyarakat untuk menemukan titik temu (Lattu, 2023). Karena itu, *Watu Pinawetengan* menjadi ruang kolektif masyarakat Minahasa berdasarkan peristiwa-peristiwa musyawarah adat sampai penyusunan strategi perang untuk mengusir kolonialisme. Musyawarah dikemudian hari menetapkan solidaritas *indigenous people* dalam mempertahankan eksistensi kearifan lokal melalui ritual.

3.2. *Watu Pinawetengan* Simbol Civil Sphere

Watu Pinawetengan menjadi tempat pertemuan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama dan pemerintah. Era kontemporer menjadikan *Watu Pinawetengan* sebagai media pertemuan setiap aspek dengan kepentingan masing-masing. Uniknya *Watu Pinawetengan* sebagai ruang pertemuan masyarakat Minahasa menjadikan berbagai strata sosial tidak berfungsi atau mengalami kesetaraan pada ruang termasuk gender pada era kapitalisme. Menurut Aristoteles, kesetaraan adalah sebuah tuntutan bagi apa yang menjadi haknya secara proposional yang bersifat distributif seperti relasi negara dan masyarakat (Aristoteles, 2004:128). Sedangkan Karl Marx, mengatakan kebebasan dan kesetaraan justru hanya bisa lahir setelah kapitalisme dilenyapkan. Kemudian, argument Marx melihat bahwa nilai tukar juga keliru, dikarenakan justru ekonomi yang ditekankan (Marx, 2012), Namun, perbincangan kesetaraan pada tokoh-tokoh di atas hanya terbatas pada ranah teoritis sehingga bersifat idealis. Berbeda

dengan *Watu Pinawetengan* menjadi tempat perundingan, pertemuan, peribadatan dalam keseharian tanpa memandang strata sosial secara formal.

Selebrasi budaya yang dilakukan di *Watu Pinawetengan* menjadi pengingat sakralitas budaya perlu untuk dinarasikan secara praksis dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk ruang keseharian. Terlepas dari konsep ideal mengenai perdebatan dan perjumpaan formal para elit yang tidak produktif dalam menciptakan ruang menjadikan masyarakat sipil terpinggirkan karena elitis cenderung mengabaikan keterlibatan keseharian. Menurut Henri Lefebvre, produksi ruang tidak selalu merujuk pada konsep ideal, sebab ruang merupakan arena bagi kaum kapitalis untuk memperebutkan ruang dan memproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan kekuasaan (Lefebvre, 1991:68). Walaupun masyarakat Minahasa berada dalam konteks gempuran kapitalisme, *Watu Pinawetengan* menjadi simbol ruang tanpa intimidasi hegemoni kapital sehingga menciptakan ruang kehendak *civil sphere*.

Watu Pinawetengan sendiri adalah teks budaya pembentuk struktur sosial bagi masyarakat Minahasa, meminjam metode dari Alexander mengenai teks kebudayaan (Alexander, 2006). Bisa jadi *Watu Pinawetengan* menjadi perjumpaan teks-teks politik, teologi, budaya lokal dan ruang keseharian di *Watu Pinawetengan*. Karena itu, selebrasi setiap tanggal 3 Januari di *Watu Pinawetengan* bukan hanya sekedar ajang untuk memamerkan kesaktian melainkan pembuka ruang bagi ingatan kolektif akan solidaritas yang terbangun pada peristiwa-peristiwa musyawarah yang pernah diadakan di *Watu Pinawetengan*. Berdasarkan hal-hal tersebut, menjadikan *Watu Pinawetengan* sebagai ruang keseharian (*quotidian*) dalam relasi lintas ruang, agama, budaya, politik dan keseharian. Sependapat dengan Phill M. Sulu yang mengatakan kebudayaan Minahasa memiliki keunikan tersendiri serta memiliki daya tarik tersendiri (Sulu, 2016:1-10). Maka, dapat dikatakan kebudayaan Minahasa yang tersymbolisasi lewat *Watu Pinawetengan* menciptakan ruang lintas praksis bagi masyarakat Minahasa.

Relasi antara *Watu Pinawetengan* dan masyarakat sipil dalam konteks Minahasa merupakan bagian dari perjumpaan masyarakat dengan teks-teks budaya pembentuk struktur hasil musyawarah. Sebelumnya untuk menjelaskan terbentuknya struktur di Minahasa perlu untuk menggali kembali nilai-nilai dari Tiwa Toar – Lumimu'ut sebab sumpah tersebut yang membentuk hak kebebasan dan ruang masyarakat sipil di Minahasa. Tiwa Toar – Lumimu'ut atau Nuwu' I Tu'a menjadi dasar masyarakat Minahasa menganut sistem egalitarianisme (kesetaraan) setiap manusia memiliki fungsinya masing-masing. Menurut Derek Parfit, egaliter adalah tidak lahir dari ruang kosong, kesetaraan terjadi karena kesadaran kolektif dari satu komunal (Parfit, 2002). Namun, pembelaan terhadap sistem kesetaraan yang terbangun dalam kehidupan masyarakat memiliki kontras sebab kesetaraan mengalami keterjajahan dunia kapital sehingga terjadinya relasi egaliter yang didasarkan pada sifat relasional persamaan prinsip yang terlihat

(Mason, 2001:61). Kembali Malonda menegaskan tentang sistem kesetaraan di Minahasa tetap terjaga dan terlepas dari hegemoni (Malonda, 1952a) walaupun berkali-kali bangsa Barat datang untuk menawarkan sistem feodal.

Menurut Rikson Ch. Karundeng, *Nuwu' I Tu'a* menjadi dasar prinsip etika asli masyarakat Minahasa yang diturunkan secara tradisi lisan (Karundeng, 2010). Bagi Karundeng benih egaliter dari masyarakat Minahasa lahir dari etika normatif *Nuwu' I Tu'a* di dalamnya terdapat konsep kesetaraan seperti, *Masigi-sigian* (saling menghormati) *Maleos-leosan* (saling mengasih). Teks-teks budaya tersebut ditransmisikan dari generasi ke generasi sehingga membentuk solidaritas kolektif serta instrumen terciptanya ruang masyarakat sipil tanpa intimidasi hegemoni. Biasanya *Nuwu' I Tu'a* dikumandangkan di *Watu Pinawetengan* pada saat musyawarah mufakat (*unanimous concensus*) untuk mengingat atau merefleksikan kembali sumpah kesetaraan yang diikrarkan leluhur Minahasa dalam membentuk komunitas sipil.

3.3. Sakralitas *Place-Lore Watu Pinawetengan*

Perkembangan zaman adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat, gelombang modernisasi, digitalisasi merambat pada aspek kebudayaan dan mempengaruhi konsep berpikir masyarakat Minahasa termasuk kepercayaan (Pantow, 1994). Perubahan sosial atas konstruksi realitas menjadikan beberapa simbol identitas Keminahasa mengalami pergeseran makna dan fungsi termasuk *Watu Pinawetengan*. Pada dasarnya simbol dalam diskursus Minahasa memiliki fungsi kesadaran kolektif, filosofis dan kultural yang sarat akan dimensi memori kolektif. Meminjam gagasan teoritis dari Lattu yang menjelaskan masyarakat dan memori kolektif akan sangat menentukan gerak emosional relasi keseharian masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya hubungan yang harmonis (Lattu, 2019:94-95). Karena itu, simbol *Watu Pinawetengan* bagi masyarakat Minahasa telah mendapat tempat khusus secara sosio-kultural.

Menurut Mircea Eliade, simbol memiliki fungsi yang sama dalam satu lintas mitologis yang diwariskan secara regenerasi, kemudian simbol dan mitos memiliki relasi yang alamiah namun dinamis, simbol menjadi realitas, kreativitas, peradaban mitologis masyarakat (Eliade, 1963:322). Senada dengan Ricoeur simbol bisa menjadi kemajuan reflektif yang bisa berkontribusi menjawab suatu problematika dalam situasi kebudayaan tertentu (Ricoeur, 1970:141). Dalam konteks Minahasa, *Watu Pinawetengan* menjadi tempat musyawarah untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang disebut walak (negeri) ketika sedang bertikai. Perdamaian yang dilakukan di *Watu Pinawetengan* memiliki korelasi dengan memori folklore merujuk pada kategorisasi kebudayaan Minahasa seperti foso-foso, (Tulaar, 1993:15) (upacara/ritual) yang dibagikan pada peristiwa *Watu Pinawetengan* (Taulu, 1981:17-19). Karena itu, *Watu Pinawetengan* membentuk

sakralitas *place-lore* dalam konteks Minahasa.

Walaupun penetrasi kekristenan terhadap kepercayaan lokal di Minahasa membuat narasi-narasi kearifan lokal termarginalisasi dan mengalami penggerusan (Mawuntu, 2020:191) namun, ingatan kolektif masyarakat mengenai *Watu Pinawetengan* masih mengakar bagi kehidupan keseharian masyarakat. Menurut Richard Niebuhr simbolisasi kekristenan berada di atas kebudayaan (Niebuhr, 1975). Mengkritisi pendapat dari Niebuhr, sebaliknya kekristenan juga turut berpengaruh pada sistem nilai-nilai kebudayaan di mana ia berada. Lattu menjelaskan bahwa, kebudayaan dan kekristenan justru sama-sama saling mentransformasi teks-teks simbolisasi kebudayaan dengan anyaman multiplisitas (Lattu, 2020:96). Dewasa ini transformasi kehadiran dari Kekristenan dalam kebudayaan Minahasa, adalah proses akulturasi antara teks Kekristenan dan teks kebudayaan yang hadir di Minahasa. Beralih dalam konteks Minahasa tentang simbolisasi penetrasi kekristenan di Minahasa menjadikan kehidupan masyarakat hibrid dan saling menghargai teks-teks kebudayaan. Melalui penghargaan terhadap teks-teks kultural masyarakat Minahasa membangun ruang kebebasan untuk membentuk narasi kesadaran kolektif melalui konstruksi *Watu Pinawetengan*.

Konstruksi masyarakat Minahasa dalam memandang *Watu Pinawetengan* sebagai tempat sakral telah membangun kesadaran kolektif. Sakralitas *Watu Pinawetengan* menjadi tempat penghubung cerita-cerita heroik para leluhur dalam memutuskan kebijakan bersama lewat musyawarah adat. Kebijakan bersama yang terjadi dalam ruang sakral membangun kekuatan pengetahuan, baik secara individual maupun komunal melalui ekspresi normatif dan kognitif, jadi masyarakat pada umumnya bersepakat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama (Dillingstone, 1986). Aspek normatif dan kognitif masyarakat Minahasa memiliki relasi dengan simbol-simbol goresan di *Watu Pinawetengan* dalam membentuk makna pada kehidupan komunal. Karena itu, sakralitas *Watu Pinawetengan* menciptakan folklore yang diekspresikan lewat simbol-simbol goresan pada. Pada sisi lain, *Watu Pinawetengan* menjadi akar terjadinya demokrasi purba masyarakat Minahasa serta membentuk *place-lore*. Secara strukturasi, *Watu Pinawetengan* menjadi teks struktur pembentuk sistem demokrasi purba masyarakat Minahasa melalui metode musyawarah bersama (Malonda, 1952a). Karena itu, *Watu Pinawetengan* menjadi tempat sakral bagi kehidupan masyarakat Minahasa dan ditransmisikan secara lisan sehingga membentuk sakralitas *place-lore*.

Bagi Dundes folklore merupakan cerita lisan atau tradisi oral yang diwariskan dari generasi ke generasi atau ditransmisikan secara lisan sehingga membentuk pengetahuan baik secara individual maupun komunal (Bacon, 1965:1). Diskusi mengenai folklore dari perspektif Dundes menjadikan folklore sebagai instrumen perlawanan masyarakat untuk mendapat kebebasan dalam memproduksi ruang.

Dalam diskursus *Watu Pinawetengan* sebagai *place-lore* memiliki keterkaitan secara emosional dengan ingatan-ingatan masa lampau masyarakat Minahasa. Karena itu, *Watu Pinawetengan* menjadi *mezbah* suci masyarakat Minahasa untuk memproduksi pengetahuan dengan bebas tanpa intimidasi kekuasaan. Dundes menjelaskan bahwa folklore bukan hanya sekedar cerita biasa atau mitos yang berkembang dalam konteks masyarakat tertentu melainkan narasi suci yang menjelaskan bagaimana komunitas tercipta seperti sekarang (Dundes, 1999:10). Maka, dapat dikatakan *Watu Pinawetengan* menjadi narasi suci masyarakat Minahasa pembentuk sakralitas *place-lore* dalam keterkaitannya dengan memori kolektif masyarakat yang membentuk demokrasi purba konteks Minahasa.

Demokrasi Minahasa adalah mandat *Maesa* (bersatu) artinya orang membawa mandat *Nuwu'*. Jika dilihat dari konteksnya ini adalah amanat/perjanjian mandat kebebasan dan kemerdekaan ada pengakuan ada tiap-tiap *Tou* (manusia) Minahasa. Sebenarnya peristiwa *Watu Pinawetengan* menjadi narasi ruang untuk menentang sistem oligarki Minahasa zaman lampau dan masa sekarang. Peristiwa *Watu Pinawetengan* bagi orang Minahasa adalah dasar menapaki kehidupan sehari-hari serta mengandung nilai-nilai sakral yang membangun moralitas hidup yang baik bagi orang Minahasa. Karena itu, *Watu Pinawetengan* bagi orang Minahasa memiliki pengertian filosofis yang dalam dan menjadi *Way of Life* (jalan hidup) untuk saling menghormati (*Masigi-sigian*) serta saling tolong menolong (*Matombol-tombolan*).

4. Simpulan

Bagi masyarakat Minahasa *Watu Pinawetengan* menjadi tempat sakral yang dikonstruksi lintas generasi sehingga membentuk pengetahuan. Walaupun perubahan sosial yang terjadi di Minahasa terus-menerus terjadi, resistensi identitas kultural Minahasa masih tetap eksis melalui ritual yang diadakan di *Watu Pinawetengan*. Berdasarkan narasi-narasi kultural yang lahir pada peristiwa-peristiwa musyawarah yang diadakan di *Watu Pinawetengan* masyarakat Minahasa membentuknya menjadi memori kolektif. Melalui kebebasan untuk melakukan selebrasi kebudayaan di *Watu Pinawetengan* mengindikasikan bahwa *Watu Pinawetengan* menjadi simbolisasi *civil sphere*. Selain itu, Eliade dalam konsep ruang sakral dan profan tidak bisa dipisahkan dengan pengaruh pemikiran dari Durkheim. Lebih lanjut, Eliade membagi konsep ruang sakral dan profan dalam menggambarkan struktur-struktur simbolis yang mengatur kehidupan masyarakat dalam aspek spiritual serta sosial. Sedangkan Durkheim melalui landasan teoritis tentang solidaritas merupakan konsep yang membentuk komunitas untuk bebas berekspresi dalam ruang-ruang sipil seperti *Watu Pinawetengan*.

Watu Pinawetengan bagi masyarakat Minahasa mensymbolisasikan resistensi identitas kebebasan ruang sipil untuk melakukan ritual serta upacara

keagamaan lainnya. Perjumpaan di *Watu Pinawetengan* bagi masyarakat Minahasa menjadi perjumpaan non-formal yang membentuk ruang tanpa penindasan yang dimaknai sebagai sakralitas *place-lore*. Sebagai ruang sakral *Watu Pinawetengan* menjadi ruang tanpa strata, ketika masyarakat dan tokoh elitis bertemu di *Watu Pinawetengan* untuk menggelar upacara maka ruang sakral tersebut mengharuskan elemen-elemen masyarakat untuk mencabut strata karena *Watu Pinawetengan* menjadi dasar terciptanya sistem egalitarianisme di Minahasa. Karena itu, *Watu Pinawetengan* bukan hanya sekedar simbol kebijaksanaan melainkan simbolisasi *Maesa, Nimaesa* (yang bersatu) tanpa memandang strata.

Referensi

- Alexander, J. C. (2006). *The Civil Sphere*. Oxford University Press Inc.
- Aristoteles. (2004). *Nichomacean Ethics: Sebuah Kitan Suci Etika* (E. Kenyowati (ed.)). Teraju.
- Bacon, W. R. (1965). *Four Function of Folklore: The Study Of Folklore Alan Dundes Ed. (The Study)*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall Inc.
- Browne, R. B., & Dundes, A. (1967). *The Study of Folklore*. In *The Journal of American Folklore* (Vol. 80, Issue 317). University Of California. <https://doi.org/10.2307/537878>
- Creswell, W. J. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication, Inc.
- Dillingstone, F. W. (1986). *Power of Symbol*. SCM Press.
- Dundes, A. (1999). *Holy Writ as Oral Lit: The Bible as Folklore*. Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Durkheim, E. (2014). *The Division of Labour in Society* (S. Lukes (ed.)). Palgrave Macmillan.
- Durkheim, E. (2017). *The Elementary Forms of Religion Life* (R. I. Muzir (ed.)). IRCiSoD.
- Eliade, M. (1963). *Patterns in Comparative Religion* (R. Sheed (ed.)). Meridian Books.
- Graafland, N. (1991). *Minahasa Negeri, Rakyat dan Budayanya*. Pustaka Utama Grafiti.
- Karundeng, R. C. (2010). "Nuwu'I Tu'a: Etika Asli Tou Minahasa. *Jurnal Fakultas Teologi, Exodus*, 2.
- Lattu, I. Y. M. (2019). "Orality and Ritual in Collective Memory: A Theoretical Discussion." *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(2).
- Lattu, I. Y. M. (2020). *Teologi Tanpa Tinta: Mencari Logos Melalui Etnografi dan Folklore*. In P. F. dan Agustinus (Ed.), *Membangun Gereja Sebagai Gerakan Yang Cerdas Dan Solider*. Sanata Dharma University Press.
- Lattu, I. Y. M. (2023). *Rethinking Interreligious Dialogue: Orality, Collective Memory and Christian-Muslim Engagements in Indonesia*. In Brill : Schoningh. Brill :

Schoningh.

- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space* (D. Nicholson-Smith (ed.)). Blasi Blackwell Ltd : Coley Road Oxford.
- Malonda, J. F. (1952a). *Membuka Tudung Dinamika Filsafat-Purba Minahasa*. Yayasan Badan Wongken-Werun.
- Malonda, J. F. (1952b). *Tjeramah-tjeramah Kebudayaan Malesung*. Jajasan Badan Budaya Wongken-Werun.
- Mamengko, R. E. (2002). *Etnik Minahasa dalam Askelerasi Perubahan: Telaah Historis, Teologis, Antropologis*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Marx, K. dan F. E. (2012). *The Communist Manifesto* (J. C. Isaac (ed.)). Yale University Press.
- Mason, A. (2001). *Egalitarianism and the Levelling Down Objection*. Analysis.
- Mawuntu, M. L. (2017). *Redefinisi dan Rekonstruksi Tou: Kajian Sosial Terhadap Identitas Sosial Minahasa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mawuntu, M. L. (2020). *Penetrasi Kekristenan Terhadap Agama Lokal Minahasa*. In I. Y. . dan T. K. Lattu (Ed.), *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Kristenisasi*. Lembaga Studi Sosial dan Agama Press.
- Mobergen, E. C. . (1928). *Geschiedenis Van De Minahasa Tot 1829*. Landsdrukkerijk.
- Niebuhr, H. R. (1975). *Christe and Culture*. Harper and Row.
- Pantow, B. (1994). *Beberapa Perubahan Kebudayaan Di Minahasa Tengah Tahun 1829-1858*. In Universitas Indonesia (Disertasi). Universitas Indonesia.
- Parfit, D. (2002). *Equality or Priority, The Ideal of Equality* (M. Clayton and A. Wiliams (ed.)). Palgrave Macmillan.
- Pinatik, H. J. A. I. Y. M. L. dan R. T. P. (2021). *Perubahan Agama Minahasa dan Kekristenan dalam Konstruksi Perjumpaan Simbol Sakral Pada Ritual di Watu Pinawetengan*. KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi, 7(2).
- Ricoeur, P. (1970). *The Symbolism of Evil*. Beacon Press.
- Riedel, J. G. . (1872). *De Minahasa In 1825: Bijdrage tot de kennis van Noord-Selebes, in indische Taal-Land-en Volkenkunde, Uingegeven door Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetensch Happen - Dell XVII - Zesde Serie Dell I*. Bruining Wijt.
- Schwarz, J. A. T. (1907). *Tontemboansche Teksten: Volume 1-2 (Volume 1-2)*. Boekhandel En Drukkerij Voorheen.
- Sen, A. (2007). *Identity And Violence: The Illusions of Destiny*. W.W. Norton and Company.
- Sompe, A. D. dan D. J. (2021). *Watu Pinawetengan as a Symbol of Unity and Brotherhood of the Minahasa Tribe*. Jurnal BIC,Batusangkar Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In Alfabeta. Alfabeta.

- Sulu, P. M. (2016). Quo Vadis Tou Minahasa? Goresan Peristiwa Melintas Masa dari Keunggulan Sampai Kelengahan. Graha Cendekia.
- Supit, B. (1986). Minahasa Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua. Sinar Harapan.
- Taulu, H. M. (1981). Terciptanya Watu Pinawetengan dan Piagam-Piagamnya. Yayasan Membangun.
- Tulaar, D. H. (1993). Opoisme Teologi orang Minahasa. Letak Study Institute on Religion and Culture.
- Tumbelaka, G. I. Y. M. L. dan S. D. (2020). Negosiasi Identitas Kekristenan dalam Ritual Kampetan di Watu Pinawetengan Minahasa. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 6(1).
- Wenas, J. (2010). Sejarah dan Kebudayaan Minahasa. Maksimedia Satyamitra.